



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI ATAS PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
TANGGAL 26 – 28 MARET 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang di Provinsi Banten pada tanggal 27 Maret 2024. Kegiatan kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., serta diikuti oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.

Kunjungan kerja spesifik tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan masalah pertanahan di Kota Tangerang, maupun di berbagai kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Banten. Mengingat, masalah penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan menjadi isu yang seakan tidak pernah habis dibicarakan.

Untuk menyelesaikan masalah pertanahan, penting untuk memastikan bahwa semua pihak didengarkan, hak-hak mereka dihormati, dan keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat luas berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan masalah pertanahan, seperti Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam kunjungan kerja spesifik ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng.Sc., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Sudaryanto, S.H., M.M., Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, Muh. Yusuf, S.H.,M.H., serta hadir pula beberapa perwakilan Kepala Kantah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Banten.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Muh. Yusuf menyampaikan bahwa jumlah bidang di Kota Tangerang sebanyak 439.299 bidang, dengan rincian sebanyak 426.824 bidang (97,16 %) sudah terdaftar dan sebanyak 385.309 bidang (87,71%) telah tanah terpetakan. Selain itu, Kota Tangerang pada tahun 2023 juga telah melakukan validasi atas bidang tanah yang belum dilandingskan atau masih sertipikat lama sebanyak 25.102 bidang dari total 37.000 bidang, sehingga masih

tersisa sebanyak 3 %. Berdasarkan capaian tersebut, Kantah Kota Tangerang pada tahun 2024 ini menargetkan sebagai “Kota Lengkap”.

Kota Lengkap berarti seluruh bidang tanah yang ada seluruh wilayah mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kota sudah terpetakan dan terdata baik, serta dilengkapi atribut tekstual (secara spasial peta tidak ada overlap dari bidang satu ke bidang lainnya) maupun yuridis (ada buku tanah maupun surat ukurnya secara akurat di sistem Badan Pertanahan Nasional).

Selain itu, menurut Muh. Yusuf, pada tahun 2024 Kantah Kota Tangerang juga telah menerbitkan Sertipikat Elektronik melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk Seluruh Tanah Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebanyak 23 Sertipikat Elektronik atas nama Pemerintah Kota Tangerang. Penerbitan sertifikat ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, jo. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1147/SK-HR.01/VII/2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Alih Media untuk Tanah Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Akhirnya, dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Komisi II DPR RI, yakni sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang yang menargetkan menjadi Kota Lengkap pada pertengahan tahun 2024 ini menyusul Kota Cilegon sebagai kota pertama di Provinsi Banten yang dideklarasikan sebagai Kota Lengkap pada 26 Maret 2024 lalu. Dengan menjadi Kota Lengkap, akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, memudahkan proses transaksi tanah, dan mendukung pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Kota Tangerang.
2. Terhadap sengketa dan konflik pertanahan terkait dengan Program Prioritas Nasional Pemerintah Pusat di Kota Tangerang seperti dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Komisi II DPR RI meminta Kantah Kota Tangerang maupun Kanwil BPN Provinsi Banten meminimalisir potensi sengketa pertanahan ke depannya dengan membuka ruang dialog dan negosiasi antara pemerintah, pemilik tanah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
3. Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi Banten memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat seperti Suku Baduwi dan Kasepuhan Adat Banten Kidul seperti hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan adat yang berlaku, serta

mendukung proses pendaftaran tanah yang dimiliki oleh kedua masyarakat adat tersebut untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan budaya masyarakat adat serta mendorong terciptanya keadilan sosial di Indonesia.

Kunjungan kerja spesifik ini diakhiri dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI melihat langsung pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang, termasuk proses pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan pemanfaatan layanan pertanahan secara digital.

Kota Tangerang, 27 Maret 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang.